



RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PACITANTAN
JL. JA. SUPRAPTO NO.8 PACITAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan karunia-Nya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan telah menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2025 yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaiand alam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2025 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dapat memberikan manfaat bagi pelaksana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih.

Pacitan, - 7 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II | 8 |
| EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU | 8 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah. | 8 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah | 12 |
| 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah | 14 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD | 16 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. | 34 |
| BAB III | 36 |
| TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH | 36 |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional | 36 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah | 36 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 39 |
| BAB IV | 42 |
| RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 42 |
| BAB V | 59 |
| PENUTUP | 59 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan yakni **“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA dan BAHAGIA”** untuk mencapai Misi Keempat yaitu **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani**, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bagian integral perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan menyelaraskan Rencana Strategis dengan visi dan misi tersebut sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dilakukan untuk mengakomodir Perubahan RKPD Tahun 2025, yang dilakukan untuk penyesuaian pagu pendanaan maupun indikator karena regulasi maupun penyesuaian target yang telah tercapai.

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok sesuai dengan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka disusunlah Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disamping sebagai wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 secara proporsional dan terukur, dengan menentukan jenjang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi hasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan terdiri dari :

- a. SEKRETARIS DAERAH
- b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - 1) Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
 - 2) Bagian Hukum
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - 1) Bagian Perekonomian
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
 - 3) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- d. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
 - 1) Bagian Umum
 - 2) Bagian Organisasi
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- e. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 ini berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2016 - 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ini bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rancangan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Sekretariat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan capaian renstra Sekretariat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah dan perkiraan pelaksanaan DPA Sekretariat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan.

Telaah hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi indicator sasaran yang memenuhi, kurang maupun melebihi target yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi kurang maupun melebihi target yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dan kinerja pelayanan, perencanaan dan

penganggaran serta kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 dengan capaian indikator sebagai berikut : indikator sasaran Score Nilai LPPD tercapai 3.2368 lebih tinggi dari, indicator Score Nilai target yang ditentukan sebesar 2.7500, indikator Score Nilai Indek Tata Kelola PBJ tercapai 81,02 lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu 66,00, indikator Score Nilai SAKIP PD tercapai 71,85 lebih rendah dari target 80 dan indikator Score Nilai IKM PD tercapai 83,59 lebih rendah dari target 84.

Matriks review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 terhadap indicator Sasaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Matrik Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021-2024

| Sasaran dan Indikator Sasaran | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| Uraian | Indikator | Target Renstra PD | | | | | | Realisasi Renstra PD | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | 1.1 Score Nilai LPPD | (Sangat Baik) 2.650 | (Sangat Baik) 2.7000 | (Sangat Baik) 2.7500 | 3,2500 | 3,3000 | 3,3500 | 2.8600 | 2.8600 | 3.2368 | 3,2368 | | |
| | 1.2 Score Nilai Indek Tata Kelola PBJ | (Baik) 45 | (Baik) 50 | (Baik) 55 | 66 | 70 | 75 | 41.23 | 50.60 | 65.67 | 81,02 | | |
| 2 Meningkatkan kualitas tata kelola PD | 2.1 Score Nilai SAKIP PD | (>B) 70 | (>B) 72 | (>B) 74 | 80 | 81 | 82 | 80.30 | 80.30 | 70.35 | 71,85 | | |
| | 2.2 Score Nilai IKM PD | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 78.78 | 83.18 | 88.31 | 83,59 | | |

Sedangkan evaluasi realisasi capaian sasaran Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra dapat dilihat sebagaimana table berikut

Tabel 2.2
Realisasi capaian indicator sasaran 2024 terhadap target akhir Renstra

| Sasaran | Indikator | Target Akhir RPJMD (2026) | Realisasi sampai dengan Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---------|
| 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | 1.1 | Score Nilai LPPD | 3,3500 | 3,2368 | 96,62% |
| | 1.2 | Score Nilai Tata Kelola PBJ | 75 | 81,02 | 108,03% |
| Rata - rata capaian sasaran Indikator 1 | | | | 102,32% | |
| 2 Meningkatkan kualitas tata kelola PD | 2.1 | Score Nilai SAKIP PD | 81,00 | 71,85 | 85,79% |
| | 2.2 | Score Nilai IKM PD | 85,50 | 83,59 | 97,77% |
| Rata - rata capaian sasaran Indikator 2 | | | | 91,78% | |
| Rata - rata capaian sasaran Indikator 1 & 2 | | | | 97,05% | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam bagian ini disajikan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, tentang Standar Pelayanan Minimal maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi kinerja Program Kegiatan sampai dengan 2024 terhadap target akhir kinerja Program Kegiatan 2026

| No | Program | Indikator Kinerja Program | Target Akhir RPJMD (2026) | Realisasi sampai dengan Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan | |
|----|--|---------------------------|---|------------------------------------|------------------|---------|
| 1 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1.1.1 | % kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah yang terlaksana | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | 1.1.2 | % kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | 1.1.3 | % kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.2.1 | Persentase kebijakan di bidang perekonomian pembangunan dan SDA yang terlaksana | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | 1.2.2 | % kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | 1.2.3 | % kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.1.1 | % kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | 2.1.2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 80 | 71,85 | 87,94% |
| | | 2.1.3 | % tata kelola keuangan yang terlaksana | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | 2.2.1 | % kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | 2.2.2 | Nilai IKM PD | 85,5 | 83,59 | 97,77% |
| | | 2.2.3 | % kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Dari table tersebut disimpulkan hampir semua indicator program dapat tercapai, kecuali indicator Nilai Sakip dan IKM yang belum memenuhi target, hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi dalam organisasi dan stage holder terkait, kedepan akan dilakukan koordinasi secara periodic baik dengan intern organisasi maupun stage holder.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

1. Permasalahan yang dihadapi

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada Tahun 2025 di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan, dan hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan tersebut adalah :

- 1) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Sekretariat Daerah yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang masih belum sesuai dengan bidang tugasnya di beberapa Bagian bisa mempengaruhi capaian kerjanya.
- 2) Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya seperti komputer dan kendaraan dinas serta sarana pendukung lainnya.
- 3) Alat Teknologi Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 4) Penyediaan data dan informasi yang kurang baik sehingga pengukuran kinerja belum didukung data-data yang valid dan ini akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja.

2. Tindak lanjut penyelesaian masalah

Dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu mendapatkan upaya pemecahan sehingga tidak mempengaruhi kinerja pada tahun berikutnya. Upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

- 1) Penataan organisasi, personil dan sarana-prasarana terus dilakukan sampai dipandang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Pengisian dan mutasi pejabat dan staf merupakan salah satu upaya pemecahan yang dilakukan, penambahan sarana dan prasarana baik melalui pengadaan maupun rehabilitasi (pemeliharaan)
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM (personil) yang ada diantaranya dengan mutasi pejabat dan staf, mengusulkan dengan formasi jabatan yang dibutuhkan di Sekretariat Daerah juga dengan menyelenggarakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan baik di dalam daerah maupun mengikuti di luar daerah.
- 3) Selalu meningkatkan upaya-upaya koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang harmonis dengan pihak-pihak terkait diantaranya dengan melaksanakan Rapat Kerja baik dengan PD, Kecamatan maupun Instansi Vertikal, Kunjungan Kerja Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ke PD dalam rangka koordinasi dan pembinaan, membangun kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal.
- 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi perlu dimaksimalkan sehingga lebih mudah dan cepat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

- 5) Perlu prioritas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- 6) Perlu meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi capaian kinerja dengan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dan tercatat secara valid.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Telaah terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Bupati selaku Kepala Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan Rancangan akhir RKPD.

Review terhadap rancangan akhir RKPD, meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan. Indikator kinerja program/kegiatan. Tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Berikut adalah Rancangan akhir RKPD Kabupaten Pacitan dengan analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | 100% | | |
| | | | | | | Persentase tata kelola keuangan yang terlaksana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | 100% | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sekretariat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | 100% | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan PD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 135.000.000,00 | 192.300.000,00 | 192.300.000,00 | 100% | 85.000.000,00 | |
| 4 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 55 Dokumen | 13 Dokumen | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 135.000.000,00 | 192.300.000,00 | 170.494.604,00 | 11 Dokumen | 85.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.205.622.253,00 | 13.166.567.253,00 | 13.166.567.253,00 | 100% | 1.048.637.975,00 | |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | 1240 Orang/bulan | 110 Orang/bulan | 1540 Orang/bulan | 1540 Orang/bulan | 12.047.929.278,00 | 12.047.929.278,00 | 11.346.292.466,00 | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 70 Dokumen | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 1.048.637.975,00 | 1.118.637.975,00 | 1.105.679.803,00 | 14 Dokumen | 1.048.637.975,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepegawaian PD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 | 100% | 145.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 4 | 1 | 1 | 2.05 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1000 Dokumen | 250 Dokumen | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 | 110.809.808,00 | 200 Dokumen | 145.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana PD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.322.097.810,00 | 3.502.852.810,00 | 3.502.852.810,00 | 100% | 4.298.097.810,00 | |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 200 Paket | 40 Paket | 30 Paket | 30 Paket | 30 Paket | 740.361.505,00 | 831.116.505,00 | 1.030.514.865,00 | 30 Paket | 1.666.361.505,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 150 Paket | 50 Paket | 30 Paket | 30 Paket | 30 Paket | 447.004.648,00 | 447.004.648,00 | 452.157.852,00 | 30 Paket | 447.004.648,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 7500 Paket | 8000 Paket | 7500 Paket | 150 Paket | 150 Paket | 588.160.000,00 | 738.160.000,00 | 819.937.470,00 | 150 Paket | 588.160.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1224 Laporan | 1200 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.546.571.657,00 | 1.486.571.657,00 | 1.323.374.132,00 | 12 Laporan | 1.596.571.657,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.146.584.978,00 | 1.146.584.978,00 | 1.146.584.978,00 | 100% | 1.465.849.778,00 | |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.146.584.978,00 | 1.146.584.978,00 | 1.097.112.908,00 | 12 Laporan | 1.465.849.778,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.029.738.439,00 | 1.139.738.439,00 | 1.139.738.439,00 | 100% | 1.529.738.439,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 302 Unit | 124 Unit | 89 Unit | 89 Unit | 89 Unit | 612.256.000,00 | 722.256.000,00 | 688.650.093,00 | 89 Unit | 612.256.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 160 Unit | 60 Unit | 50 Unit | 50 Unit | 50 Unit | 151.204.733,00 | 151.204.733,00 | 185.955.986,00 | 50 Unit | 185.955.986,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 16 Unit | 4 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 266.277.706,00 | 266.277.706,00 | 290.722.429,00 | 6 Unit | 266.277.706,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Gaji dan Penunjang Operasional KDH dan WKDH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.033.374.050,00 | 2.033.374.050,00 | 2.033.374.050,00 | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 14 Orang/Bulan | 24 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 28 Orang/Bulan | 28 Orang/Bulan | 1.433.374.050,00 | 1.433.374.050,00 | 1.503.575.625,00 | 28 Orang/Bulan | 1.433.374.050,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | 4 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 14 Orang/Bulan | 24 Orang/Bulan | 500 Orang/Bulan | 28 Orang/Bulan | 28 Orang/Bulan | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 28 Orang/Bulan | 600.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.12 | | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.351.331.068,00 | 3.401.331.068,00 | 3.401.331.068,00 | 100% | 3.432.331.068,00 | |
| 4 | 1 | 1 | 2.12 | 1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala | 60 Paket | 12 Paket | 12 Paket | 12 Paket | 12 Paket | 2.219.400.000,00 | 2.219.400.000,00 | 2.128.630.030,00 | 12 Paket | 2.300.400.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | 3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1200 Laporan | 242 Laporan | 240 Laporan | 240 Laporan | 240 Laporan | 275.000.000,00 | 425.000.000,00 | 321.847.240,00 | 240 Laporan | 336.787.780,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | 1 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT | Persentase dibidang Bina Mental dan Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terlaksana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.413.000.000,00 | 5.583.000.000,00 | 4.839.652.208,00 | 100% | 3.050.000.000,00 | |
| 4 | 1 | | | | | Persentase Kebijakan di Bidang Perundang-undangan, bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Terlaksana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | 100% | | |
| | | | | | | Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang terlaksana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 750.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 100% | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Fasilitas dan Koordinasi Bidang Administrasi Pemerintahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 750.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 100% | 700.000.000,00 | |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 29 Dokumen | 3 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 98.186.122,00 | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 100 Dokumen | 4 Dokumen | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 279.066.562,00 | 22 Dokumen | 350.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 100 Dokumen | 5 Dokumen | 140 Dokumen | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 200.000.000,00 | 300.000.000,00 | 197.550.890,00 | 17 Dokumen | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Fasilitas dan Koordinasi Bidang Kesra | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.813.000.000,00 | 3.883.000.000,00 | 3.883.000.000,00 | 100% | 1.500.000.000,00 | |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 150 Dokumen | 235 Dokumen | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 3.313.000.000,00 | 3.383.000.000,00 | 3.166.554.206,00 | 150 Dokumen | 1.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 28 Dokumen | 216 Dokumen | 200 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 47.694.362,00 | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 80 Dokumen | 81 Dokumen | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 440.000.000,00 | 440.000.000,00 | 429.202.876,00 | 80 Dokumen | 440.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 4 | 1 | 2 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 100% | 700.000.000,00 | |
| 4 | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 194 Dokumen | 110 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | 232.441.562,00 | 7 Dokumen | 310.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 2 | 2.03 | 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 1 Kasus | 1 Kasus | 5 Kasus | 5 Kasus | 5 Kasus | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 159.154.480,00 | 5 Kasus | 210.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 3500 Dokumen | 732 Dokumen | 777 Dokumen | 777 Dokumen | 777 Dokumen | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 131.206.706,00 | 777 Dokumen | 180.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 2 | 2.04 | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerja Sama | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 100% | 150.000.000,00 | |
| 4 | 1 | 2 | 2.04 | 1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 30 Dokumen | 60 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 98.594.442,00 | 10 Dokumen | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | 2 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase fasilitasi dan kebijakan di bidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.302.796.816,00 | 2.307.000.000,00 | 1.968.057.140,00 | 100% | 2.907.796.816,00 | |
| 4 | 1 | | | | | Persentase Kebijakan dan fasilitasi bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | 100% | | |
| | | | | | | Persentase Kebijakan dan fasilitasi bidang pembangunan yang terlaksana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | 100% | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 387.000.000,00 | 387.000.000,00 | 387.000.000,00 | 100% | 375.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 60 Dokumen | 5 Dokumen | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 106.039.654,00 | 25 Dokumen | 125.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 15 Dokumen | 5 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 262.000.000,00 | 262.000.000,00 | 191.153.082,00 | 3 Dokumen | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | 2 | 2.01 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Fasilitas dan Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 600.000.000,00 | 595.000.000,00 | 595.000.000,00 | 100% | 718.000.000,00 | |
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 40 Dokumen | 8 Dokumen | 7 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 246.138.586,00 | 12 Dokumen | 275.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 60 Laporan | 10 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 135.408.857,00 | 12 Laporan | 175.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 60 Laporan | 10 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 150.000.000,00 | 145.000.000,00 | 98.776.039,00 | 12 Laporan | 267.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | 2 | 2.02 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Fasilitas dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Barang dan jasa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 100% | 1.274.000.000,00 | |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 500 Dokumen | 101 Dokumen | 110 Dokumen | 110 Dokumen | 110 Dokumen | 324.355.000,00 | 324.355.000,00 | 281.087.511,00 | 110 Dokumen | 409.650.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 250 Dokumen | 45 Dokumen | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 187.605.000,00 | 187.605.000,00 | 152.421.515,00 | 50 Dokumen | 324.650.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1800 Orang | 465 Orang | 400 Orang | 400 Orang | 400 Orang | 288.040.000,00 | 288.040.000,00 | 252.787.295,00 | 400 Orang | 539.700.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | 2 | 2.03 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Presentase Fasilitas dan Koordinasi Bidang SDA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 515.796.816,00 | 525.000.000,00 | 525.000.000,00 | 100% | 540.796.816,00 | |
| 4 | 1 | 3 | 2.04 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, ehutanan, Kelautan dan perikanan, perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Naker | 60 Dokumen | 5 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 440.796.816,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 12 Dokumen | 440.796.816,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 3 | 2.04 | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, LH, Kominfo, perhubungan, Statistik, Persandian | 60 Dokumen | 10 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 54.244.601,00 | 12 Dokumen | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | 34.284.545.414,00 | 34.967.748.598,00 | 32.595.180.503,00 | | 34.929.597.994,00 | |

Pada review terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah terdapat kebijakan Pusat yang berdampak pada pengurangan pagu anggaran yaitu terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu memangkas beberapa belanja pendukung terutama belanja perjalanan dinas yang dilakukan efisiensi sebesar 50 % dan belanja barang jasa lainnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2025 Sekretariat daerah Kabupaten Pacitan menangani program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditunjuk kepada PD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Usulan masyarakat tersebut meliputi belanja hibah kepada organisasi masyarakat dan bantuan sosial kepada individu yang kesemuanya diakomodir dalam Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.

Tabel 2.5
Daftar Usulan Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025

| No | Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan | Besaran Usulan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| 1 | MAJELIS ULAMA INDONESIA (MU) KABUPATEN PACITAN [HIBAH] Alamat : Jl. S.Parman krajan Pucangsewu Pacitan | Rp. 25.000.000 | |
| 2 | IKATAN PERSAUDARAAN HAJI KAB. PACITAN (IPHI) [HIBAH] Alamat : Lingkungan Barehan Kelurahan Ploso Pacitan | Rp. 25.000.000 | |
| 3 | DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN PACITAN [HIBAH] Alamat : JL. HOS COKROAMINOTO NO.15 PACITAN | Rp. 25.000.000 | |
| 4 | PC NAHDLATUL ULAMA (NU) KABUPATEN PACITAN [HIBAH] Alamat : JL. S.PARMAN 44 PACITAN | Rp. 25.000.000 | |
| 5 | Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kab.Pacitan [HIBAH] Alamat : Jl Let.Jend.Suprpto gang 1 No 1 Tuban Sidoharjo | Rp. 25.000.000 | |
| 6 | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PACITAN [HIBAH] Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No.8 Pacitan | Rp. 150.000.000 | |
| 7 | Panitia Pembangunan Masjid Besar AT-TAQWA Kecamatan Arjosari [HIBAH] Alamat : Km 1 Arjosari Pacitan | Rp. 100.000.000 | |
| 8 | SMK MA"ARIF SUDIMORO Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro Kec.Sudimoro [HIBAH] Alamat : Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro Kec.Sudimoro Kab. Pacitan | Rp. 199.900.000 | |
| 9 | Yayasan Teknologi Nahdlatul Ulama Sudimoro Lingkungan Teknologi RT 03 Rw 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro [HIBAH] Alamat : Lingkungan Teknologi RT 03 Rw 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro, Kec.SudimoroKab. Pacitan | Rp. 200.000.000 | |
| 10 | Pondok Pesantren Darul Huda RT 01 RW 02 DUSUN NGALURAN, Desa Glinggangan, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 01 RW 02 DUSUN NGALURAN, Desa Glinggangan, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan | Rp. 84.000.000 | |
| 11 | Pondok Pesantren Terpadu Al Hidayah Dusun Gemah, Desa Ketoro Harjo, Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : Dusun Gemah, Desa Ketoro Harjo, Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan | Rp. 25.000.000 | |
| 12 | PONDOK PESANTREN TEKNOLOGI NU SUDIMORO Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro Kec.Sudimoro [HIBAH] Alamat : Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro Kec. Sudimoro Kab. Pacitan | Rp. 168.750.000 | |
| 13 | KELOMPOK YASIN NGUDI ILMU RT.03 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT.03 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN | Rp. 25.000.000 | |
| 14 | MASJID NURUL IMAN RT.01 RW.07 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN KAB. PACITAN [HIBAH] Alamat : RT.01 RW.07 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN KAB. PACITAN | Rp. 25.000.000 | |

| | | | |
|----|--|-----------------|--|
| 15 | MASJID DARUSALLAM RT.02 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT.02 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN | Rp. 25.000.000 | |
| 16 | MASJID AT-TAUHID RT.03 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT.03 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN | Rp. 25.000.000 | |
| 17 | MDT Wustho Al-Ma"arif Jl. Raya Sudimoro No. 08, Desa Sudimoro Kec. Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : Jl. Raya Sudimoro No. 08, Desa Sudimoro Kec. Sudimoro Kab. Pacitan | Rp. 82.800.000 | |
| 18 | MASJID AN NUR RT 01 RW 09 DUSUN PLAPAR 2 DESA JATIGUNUNG DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT 01 RW 09 DUSUN PLAPAR 2 DESA JATIGUNUNG DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN | Rp. 25.000.000 | |
| 19 | MADRASAH DINIYAH BAHRUL 'ULUM RT 02 RW 06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT 02 RW 06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN | Rp. 25.000.000 | |
| 20 | MASJID BABUTTAUBAH RT 10 RW 05 Dusu Purwoasri, Desa Sembowo Kec. Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 10 RW 05 Dusun Purwoasri ,Desa SEmbowo Kec. Sudimoro Kab. Pacitan | Rp. 26.000.000 | |
| 21 | Masjid Darul Ulum RT 02 RW 9 Dusun Rejomulyo Desa Sudimoro Kec.Sudimoro [HIBAH] Alamat : RT 02 RW 9 Dusun Rejomulyo Desa Sudimoro Kec. Sudimoro | Rp. 20.000.000 | |
| 22 | MASJID JAMI' SETROKETIPO RT 02 RW 06 DUSUN KRAJAN LOR DESA NANGGUNGAN KEC. PACITAN [HIBAH] Alamat : RT 02 RW 06 DUSUN KRAJAN LOR DESA NANGGUNGAN KEC. PACITAN | Rp. 25.000.000 | |
| 23 | RA NU SUDIMORO Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan | Rp. 99.550.000 | |
| 24 | LEMBAGA PENDIDIKAN MA"ARIF NU KORTAN SUDIMORO RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan | Rp. 112.000.000 | |
| 25 | MASJID AT TAQWA RT 004 RW 004 DUSUN BENGKAL DESA TANJUNGSARI KEC.PACITAN [HIBAH] Alamat : RT 004 RW 004 DUSUN BENGKAL DESA TANJUNGSARI KEC.PACITAN | Rp. 24.000.000 | |
| 26 | MASJID HAJAR FATIMAH RT 05 RW 08 DUSUN MEKARSARI DESA SUDIMORO, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 05 RW 08 DUSUN MEKARSARI DESA SUDIMORO, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan | Rp. 25.000.000 | |
| 27 | MUSHOLA AN NABAWI RT 05 RW 08 DUSUN MEKARSARI DESA SUDIMORO, Kec. Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 05 RW 08 DUSUN MEKARSARI DESA SUDIMORO, Kec. Sudimoro Kab. Pacitan | Rp. 20.000.000 | |

| | | | |
|----|---|--------------------------|--|
| 28 | MUSHOLA SABILLAL MUTAQIM RT 03 RW 11 Dusun Sepang Desa Tulakan Kec. Tulakan [HIBAH] Alamat : RT 03 RW 11 Dusun Sepang Desa Tulakan Kec. Tulakan | Rp. 15.000.000 | |
| 29 | Masjid Nurul Huda RT 001 RW 004 Dusun Krajan Kidul Desa Nanggungun, Kec. Pacitan Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 001 RW 004 Dusun Krajan Kidul Desa Nanggungun, Kec. Pacitan Kab. Pacitan | Rp. 25.000.000 | |
| 30 | MUSOLA AL FATAH Lingkungan Mbangteklok Dusun Sidorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : Lingkungan Mbangteklok Dusun Sidorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan | Rp. 26.000.000 | |
| 31 | Masjid AL-MUHAJIRIN [HIBAH] Alamat : RT. 005 RW. 001 Dusun Krajan Desa Widoro, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Kab. Pacitan | Rp. 30.000.000 | |
| 32 | YAYASAN JANAIZ JANNAH Jl.Basuki Rahmat 39 Pacitan [HIBAH] Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.39 Pacitan | Rp. 30.000.000 | |
| | | Rp. 1.763.000.000 | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah- Daerah RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah **”Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel”**

Sedangkan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan indikator kinerja :
 - a. Score Nilai LPPD
 - b. Score Nilai Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

2. Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah Dengan indikator kinerja :
 - a. Score Nilai SAKIP Perangkat Daerah
 - b. Score Nilai IKM Perangkat Daerah

Matriks tujuan dan sasaran serta indikator maupun target yang Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Matriks Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

| TUJUAN | | | | | | | | | | SASARAN | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|--------------------------|------|------|------|------|------|--------|-----------|--|-------|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| TUJUAN | INDIKATOR | Target | | | | | | | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | | | | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| 1 | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel | 1 | Score Nilai SAKIP Daerah | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 | 1.1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | 1.1.1 | Score Nilai LPPD | (Sangat Baik) 2.650 | (Sangat Baik) 2.7000 | (Sangat Baik) 2.7500 | 3,2500 | 3,3000 | 3,3500 |
| | | 2 | Score Nilai IKM Daerah | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | | | 1.1.2 | Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ | (Baik) 45 | (Baik) 50 | (Baik) 55 | 66 | 70 | 75 |
| | | | | | | | | | | 1.2 | Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah | 1.2.1 | Score Nilai Sakip PD | (>B) 70 | (>B) 72 | (>B) 74 | 80 | 81 | 82 |
| | | | | | | | | | | | | 1.2.2 | Score Nilai IKM PD | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 |

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini mengikuti perubahan regulasi yang sangat frontal terkait dengan nomenklatur Program, Kegiatan dan Penambahan Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan pagu indikatif anggaran, hal ini disebabkan karena kebijakan serta pertimbangan agar program dan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik dan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

Tabel 3.2
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan |
| 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | | Fasilitasi Kerjasama Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri |
| 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANAAN TAHUN 2025

| Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--|----------------|-------------------|
| Kode | Uraian | Tahun N | | | | | | | | | | Tahun + 1 | | | | |
| | | Sebelum | | | | | Sesudah | | | | | | | | | |
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | | | | | |
| Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 34.260.686.189 | 707.062.409 | | | 34.967.748.598 | 32.666.534.811 | 918.645.692 | | 33.585.180.503 | 34.929.597.994,00 |
| 4 | 01 | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 34.260.686.189 | 707.062.409 | | | 34.967.748.598 | 32.666.534.811 | 918.645.692 | | 33.585.180.503 | 34.929.597.994,00 |
| 4 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 26.444.074.505 | 633.674.093 | | | 27.077.748.598 | 26.067.584.606 | 709.886.549 | | 26.777.471.155 | 28.971.801.178,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 192.300.000 | | | | 192.300.000 | 170.494.604 | | | 170.494.604 | 85.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 192.300.000 | | | | 192.300.000 | 170.494.604 | | | 170.494.604 | 85.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13.166.567.253 | | | | 13.166.567.253 | 12.453.172.269 | | | 12.453.172.269 | 13.205.622.253,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.047.929.278 | | | | 12.047.929.278 | 11.346.292.466 | | | 11.346.292.466 | 12.156.984.278,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|----------------------|--------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1.118.637.975 | | | | 1.118.637.975 | 1.106.879.803 | | | | 1.106.879.803 | 1.048.637.975,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 145.000.000 | | | | 145.000.000 | 110.809.808 | | | | 110.809.808 | 145.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 145.000.000 | | | | 145.000.000 | 110.809.808 | | | | 110.809.808 | 145.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.894.944.259 | 607.908.551 | | | 3.502.852.810 | 3.285.663.312 | 684.121.007 | | | 3.969.784.319 | 4.298.097.810,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 443.078.086 | 388.038.419 | | | 831.116.505 | 610.667.275 | 463.647.590 | | | 1.074.314.865 | 1.666.361.505,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 227.134.516 | 219.870.132 | | | 447.004.648 | 231.684.435 | 220.473.417 | | | 452.157.852 | 447.004.648,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 738.160.000 | | | | 738.160.000 | 1.119.937.470 | | | | 1.119.937.470 | 588.160.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.486.571.657 | | | | 1.486.571.657 | 1.323.374.132 | | | | 1.323.374.132 | 1.596.571.657,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.146.584.978 | | | | 1.146.584.978 | 1.097.112.908 | | | | 1.097.112.908 | 1.465.849.778,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.146.584.978 | | | | 1.146.584.978 | 1.097.112.908 | | | | 1.097.112.908 | 1.465.849.778,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.139.738.439 | | | | 1.139.738.439 | 1.465.328.508 | | | | 1.465.328.508 | 1.529.738.439,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 722.256.000 | | | | 722.256.000 | 988.650.093 | | | | 988.650.093 | 612.256.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 151.204.733 | | | | 151.204.733 | 185.955.986 | | | | 185.955.986 | 651.204.733,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|----------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 266.277.706 | | | 266.277.706 | 290.722.429 | | | 290.722.429 | 266.277.706,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2.033.374.050 | | | 2.033.374.050 | 2.103.575.625 | | | 2.103.575.625 | 2.033.374.050,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.433.374.050 | | | 1.433.374.050 | 1.503.575.625 | | | 1.503.575.625 | 1.433.374.050,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 600.000.000 | | | 600.000.000 | 600.000.000 | | | 600.000.000 | 600.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 3.401.331.068 | | | 3.401.331.068 | 3.586.239.724 | | | 3.586.239.724 | 3.432.331.068,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 2.219.400.000 | | | 2.219.400.000 | 2.348.630.030 | | | 2.348.630.030 | 2.300.400.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 1.041.653.000 | | | 1.041.653.000 | 1.045.814.829 | | | 1.045.814.829 | 991.653.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 140.278.068 | | | 140.278.068 | 191.794.865 | | | 191.794.865 | 140.278.068,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | 624.234.458 | 25.765.542 | | 650.000.000 | 470.462.916 | 25.765.542 | | 496.228.458 | 690.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 150.000.000 | | | 150.000.000 | 176.323.000 | | | 176.323.000 | 170.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 274.234.458 | 25.765.542 | | 300.000.000 | 149.307.896 | 25.765.542 | | 175.073.438 | 310.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 200.000.000 | | | 200.000.000 | 144.832.020 | | | 144.832.020 | 210.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|----------------------|-------------------|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.700.000.000 | | | | 1.700.000.000 | 1.324.724.932 | | | | 1.324.724.932 | 2.086.787.780,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | 1.075.000.000 | | | | 1.075.000.000 | 830.562.387 | | | | 830.562.387 | 1.550.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 200.000.000 | | | | 200.000.000 | 172.315.305 | | | | 172.315.305 | 200.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 425.000.000 | | | | 425.000.000 | 321.847.240 | | | | 321.847.240 | 336.787.780,00 |
| 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 5.538.689.466 | 44.310.534 | | | 5.583.000.000 | 4.795.341.674 | 44.310.534 | | | 4.839.652.208 | 3.050.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | 850.000.000 | | | | 850.000.000 | 574.803.574 | 0 | | | 574.803.574 | 700.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | 98.186.122 | | | | 98.186.122 | 150.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 400.000.000 | | | | 400.000.000 | 279.066.562 | 0 | | | 279.066.562 | 350.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 300.000.000 | | | | 300.000.000 | 197.550.890 | | | | 197.550.890 | 200.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 3.853.773.700 | 29.226.300 | | | 3.883.000.000 | 3.614.225.144 | 29.226.300 | | | 3.643.451.444 | 1.500.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 3.353.773.700 | 29.226.300 | | | 3.383.000.000 | 3.137.327.906 | 29.226.300 | | | 3.166.554.206 | 1.000.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 60.000.000 | | | | 60.000.000 | 47.694.362 | | | | 47.694.362 | 60.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 440.000.000 | | | | 440.000.000 | 429.202.876 | | | | 429.202.876 | 440.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 684.915.766 | 15.084.234 | | | 700.000.000 | 507.718.514 | 15.084.234 | | | 522.802.748 | 700.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|----------------------|-------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|-------------------------|
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 310.000.000 | | | | 310.000.000 | 232.441.562 | | | 232.441.562 | 310.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 210.000.000 | | | | 210.000.000 | 159.154.480 | | | 159.154.480 | 210.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 164.915.766 | 15.084.234 | | | 180.000.000 | 116.122.472 | 15.084.234 | | 131.206.706 | 180.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | | Fasilitas Kerjasama Daerah | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | 98.594.442 | | | 98.594.442 | 150.000.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | 98.594.442 | | | 98.594.442 | 150.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 2.277.922.218 | 29.077.782 | | | 2.307.000.000 | 1.803.608.531 | 164.448.609 | | 1.968.057.140 | 2.907.796.816,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 387.000.000 | | | | 387.000.000 | 297.192.736 | | | 297.192.736 | 375.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 125.000.000 | | | | 125.000.000 | 106.039.654 | | | 106.039.654 | 125.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 262.000.000 | | | | 262.000.000 | 191.153.082 | | | 191.153.082 | 250.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 595.000.000 | | | | 595.000.000 | 447.395.554 | 32.927.928 | | 480.323.482 | 718.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 275.000.000 | | | | 275.000.000 | 221.795.398 | 24.343.188 | | 246.138.586 | 275.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 175.000.000 | | | | 175.000.000 | 126.824.117 | 8.584.740 | | 135.408.857 | 175.500.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 145.000.000 | | | | 145.000.000 | 98.776.039 | | | 98.776.039 | 267.500.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 785.697.761 | 14.302.239 | | | 800.000.000 | 597.896.809 | 88.399.512 | | 686.296.321 | 1.274.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|---|-----------------------|--------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|-----------------------|--------------------------|
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 310.052.761 | 14.302.239 | | | 324.355.000 | 208.038.522 | 73.048.989 | | | 281.087.511 | 409.650.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 187.605.000 | | | | 187.605.000 | 152.421.515 | | | | 152.421.515 | 324.650.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 288.040.000 | | | | 288.040.000 | 237.436.772 | 15.350.523 | | | 252.787.295 | 539.700.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 510.224.457 | 14.775.543 | | | 525.000.000 | 461.123.432 | 43.121.169 | | | 504.244.601 | 540.796.816,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0001 | Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan | 435.224.457 | 14.775.543 | | | 450.000.000 | 406.878.831 | 43.121.169 | | | 450.000.000 | 440.796.816,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0002 | Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 75.000.000 | | | | 75.000.000 | 54.244.601 | | | | 54.244.601 | 100.000.000,00 |
| Jumlah | | | | | | 34.260.686.189 | 707.062.409 | | | 34.967.748.598 | 32.666.534.811 | 918.645.692 | | | 33.585.180.503 | 34.929.597.994,00 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.